

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DARING

Sekolah : SMA UNGGUL DEL  
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia  
Kelas/Semester : XII/I  
Materi Pokok : Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin  
Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (2 x 30 menit)

### A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menganalisis latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin</li><li>2. Menganalisis pengaruh Dekrit Presiden</li><li>3. Menganalisis kondisi politik pada masa Demokrasi Terpimpin</li><li>4. Menganalisis berbagai penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin</li><li>5. Menganalisis arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li></ol>
4.4 Menyajikan hasil penalaran kehidupan bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lain.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.</li></ol>

### B. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran *Discovery Learning* peserta didik dapat menganalisis dan merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis), proaktif (kreatif), mampu berkomunikasi, rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras serta dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam penyelesaian setiap penugasan, pantang menyerah, dan menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi.

### C. Materi Ajar

Fakta : Dekrit Presiden, Trikora, Tritura, Dwikora  
Konsep : NEFO, OLDEFO, Dekrit, Konsepsi Presiden, Konstituante  
Metakognitif : Pengaruh PKI dalam kondisi politik pada masa Demokrasi Terpimpin  
Prosedural : Penelitian sederhana

#### D. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik-TPACK  
Model : *Active Learning*  
Metode : *Discovery Learning*

#### E. Media Pembelajaran

- Zoom Meeting, Moodle dan WA Group
- Video pidato Soekarno mengenai Supersemar
- *Power point* mengenai Demokrasi Terpimpin

#### Alat/Bahan:

- Gawai
- Laptop
- Internet

#### F. Sumber Belajar

- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga
- Hapsari, Ratna. 2015. *Sejarah Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial Untuk SMA/MA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga.
- Modul Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
- Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 6

#### G. Langkah-langkah Pembelajaran

Alokasi waktu: 2 x 30 menit

Tahapan Kegiatan	Aktivitas	Alokasi Waktu
<b>Pendahuluan</b>	<b>Persiapan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Guru mengunggah materi ajar ke <i>platform</i> moodle seminggu sebelum kbm (TPACK)</li></ul> <b>Orientasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Guru dan siswa bergabung dalam WAG. Guru memberi salam dalam WAG (PPK)</li><li>➤ Guru meminta siswa untuk mengisi daftar hadir pada moodle (TPACK)</li><li>➤ PIC (<i>Person In Charge</i>) Zoom Meeting membagikan tautan Zoom Meeting sehari sebelum kbm. Guru dan siswa bergabung dalam zoom meeting (TPACK)</li><li>➤ Bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa (PPK)</li><li>➤ Guru memastikan siswa sudah membaca modul dan power point yang diunggah di moodle (TPACK)</li></ul>	10 menit

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memeriksa kehadiran siswa</li> <li>➤ Menyampaikan tujuan pembelajaran</li> </ul> <p><b>Apersepsi:</b> Guru memberikan pertanyaan “Mengapa pada tahun 1959 Indonesia menerapkan Demokrasi Terpimpin?”</p>	
<p><b>Kegiatan Inti:</b></p> <p><i>Stimulation</i> (Pemberian rangsangan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topic kondisi politik pada masa Demokrasi Terpimpin dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Melihat</b> (tanpa atau dengan alat) Menayangkan/membagikan video dan power point mengenai Demokrasi Terpimpin melalui zoom</li> <li>- <b>Mengamati</b> Mengamati video yang dibagikan oleh guru</li> <li>- <b>Membaca</b> Kegiatan literasi ini dilakukan dirumah dan pada saat kbm dengan membaca materi dari modul atau buku lain yang relevan serta informasi dari internet yang berkaitan dengan kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> <li>- <b>Menyimak</b> Mendengar arahan dan penjelasan dari guru mengenai garis besar materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> </ul> </li> </ul>	45 menit
<p><i>Problem statement</i> (Pemberian masalah)</p>	<p><b>Critical thinking (Berpikir kritis):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin berdasarkan video yang diamati dan materi yang sudah dibaca. Siswa menyampaikan pertanyaan dan didiskusikan dalam zoom meeting.</li> </ul>	
<p><i>Data Collection</i> (Pengumpulan data)</p>	<p><b>Literasi:</b> Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mengamati</b> Siswa mengamati dengan seksama video, gambar dan slide presentasi yang disajikan mengenai kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan mencoba menginterpretasikannya.</li> <li>➤ <b>Membaca</b> Siswa secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi untuk menambah</li> </ul>	

	<p>pemahaman mengenai materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Aktivitas</b> Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.</li> </ul> <p><b>Collaboration (Kerjasama)</b> Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mendiskusikan</b> Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku/modul mengenai materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> <li>➤ <b>Mengumpulkan informasi</b> Mencatat semua informasi tentang materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> <li>➤ <b>Mempresentasikan ulang</b> Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin sesuai dengan pemahamannya lewat Zoom (<i>communication</i>)</li> <li>➤ <b>Bertukar informasi</b> Siswa saling bertukar informasi mengenai kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya maka siswa akan mendapat pemahaman yang utuh mengenai materi yang dibahas (<i>communication</i>)</li> </ul>	
<p><b>Data processing</b> (pengolahan data)</p>	<p><b>Collaboration (kerjasama) dan Critical thinking (berpikir kritis)</b> Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berdiskusi tentang materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.</li> <li>➤ Mengolah informasi dari data yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi</li> </ul>	
<p><b>Verification</b> (Pembuktian)</p>	<p><b>Critical thinking (berpikir kritis)</b> Siswa mendiskusikan dan memverifikasi hasil kajiannya dengan data-data atau informasi dari buku. Siswa dan guru secara bersama-sama membahas persoalan yang dimunculkan pada awal kegiatan inti.</p>	

<p><b>Generalization</b> (Menarik kesimpulan)</p>	<p><b>Communication (berkomunikasi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyampaikan hasil diskusi tentang materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan secara klasikal melalui zoom.</li> <li>➤ Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan lewat zoom</li> <li>➤ Bertanya atas presentasi tentang materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> </ul> <p><b>Creativity (kreativitas)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> <li>➤ Menjawab pertanyaan tentang kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> <li>➤ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</li> </ul>	
<p><b>Penutup</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiap kelompok mengumpulkan laporan hasil diskusi</li> <li>➤ Membuat resume (<i>creativity</i>) dengan bimbingan guru tentang point-point penting dan nilai-nilai yang bisa diambil dari materi yang dibahas</li> <li>➤ Memberikan penguatan materi</li> <li>➤ Guru mengapresiasi sikap siswa selama proses kbm</li> <li>➤ Memberikan salam</li> </ul>	<p>5 menit</p>

## H. Penilaian

### 1. Teknik Penilaian:

- a. Penilaian sikap : Observasi/Jurnal
- b. Penilaian pengetahuan : tes tertulis
- c. Penilaian keterampilan : laporan hasil diskusi

### 2. Bentuk penilaian:

- a. Observasi : lembar pengamatan aktivitas peserta didik

- b. Tes tertulis : essay dan pilihan ganda
3. Instrumen penilaian (terlampir)

Laguboti, September 2020

Mengetahui

Kepala SMA Unggul Del

Guru Pelajaran

Arini Desianti Parawi, S.Pd.

Erika Siboro, S.Pd

## Lampiran 1

### a. Penilaian Jurnal

Nama Peserta Didik :

Kelas / Semester :

Aspek yang diamati :

No.	Hari/ Tanggal	Kejadian	Keterangan

### b. Pilihan Ganda dan Essay

#### Pilihan Ganda

1. Dampak dekrit Presiden 5 Juli 1959 terhadap perpolitikan di Indonesia adalah ...
  - A. anggota kabinet berasal dari partai pendukung pemerintah
  - B. penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan anggota DPR
  - C. menetapkan manifesto politik sebagai garis besar haluan negara
  - D. pembubaran partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah
  - E. mengganti UUD 1945 dengan UUD sementara
2. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, presiden Soekarno yang mengatasnamakan dirinya “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan ....
  - A. Dwi Komando Rakyat
  - B. Tri Tuntutan Rakyat
  - C. Tri Komando Rakyat

- D. Dwi Tuntutan Rakyat
- E. Hati Nurani Rakyat

3. Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat dengan tujuan untuk ...

- A. mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa
- B. menolak pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri atas Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei
- C. mendukung perjuangan rakyat Kalimantan Utara yang ingin merdeka dari Malaysia
- D. mendukung perjuangan rakyat Irian Barat yang ingin merdeka dari Belanda
- E. membantu TKR dan laskar pejuang dalam pertempuran melawan agresi tentara Belanda

4. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB adalah ...

- A. Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
- B. PBB dikuasai negara-negara imperialis
- C. PBB tidak dapat membantu menyelesaikan masalah Irian Barat
- D. PBB secara diam-diam membantu pemberontakan PRRI/Permesta
- E. PBB tidak membantu kemelut politik di Indonesia

5. Yang dimaksud dengan Angkatan Kelima yang disampaikan PKI pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ...

- A. Buruh dan petani yang dipersenjatai
- B. Kekuatan pertahanan yang dimobilisasi pemerintah
- C. Kekuatan militer yang digalang oleh rakyat
- D. Laskar-laskar perjuangan yang dibentuk oleh para pemuda diberbagai daerah
- E. Kekuatan pertahanan diluar empat angkatan yang sudah ada

6. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin tahun 1956-1966 terjadi pelanggaran terhadap UUD 45, yaitu ....

- A. Pengangkatan presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI
- B. Presiden mendirikan Depemas dan mencanangkan DEKON
- C. Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 yang digantikan DPR-GR

- D. Pemberlakuan ideologi Nasakom sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- E. Pemutusan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda akibat dari masalah Irian Barat

7. Pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI merupakan partai politik yang cukup disegani karena ....

- A. menjadi partai pemegang pemilu 1955
- B. menjadi partai politik yang radikal
- C. menjadi partai politik yang paling didukung oleh rakyat
- D. menjadi partai politik yang terdepan mendukung kebijakan presiden
- E. menjadi partai yang terkaya

8. Dalam usahanya merebut pengaruh politik di Indonesia, PKI menggunakan berbagai macam cara yang akhirnya nanti menyulut pembantaian massal anggotanya pasca G 30 S. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan PKI, *kecuali* ....

- A. Aksi sepihak penyerobotan lahan
- B. Usul pembentukan Angkatan ke V dari kalangan buruh tani
- C. Melakukan infiltrasi ke tubuh kekuatan militer
- D. Membangun kerjasama dengan Uni Soviet dalam menggalang kekuatan komunis
- E. Mengambil sikap mendukung Nasakom sebagai ideologi dalam Demokrasi Terpimpin

9. Berakhirnya Orde Lama ditandai dengan situasi ekonomi ...

- A. Bank-bank banyak dilikuidasi
- B. Harga bahan pokok meningkat
- C. Pergantian menteri perekonomian
- D. Tidak dapat berdagang dengan luar negeri
- E. Cadangan emas Indonesia menipis

10. Arti Supersemar bagi Soekarno adalah ...

- A. Penyerahan kekuasaan
- B. Perintah pengamanan
- C. Pengangkatan jabatan
- D. Penghapusan tugas

E. Permohonan tugas

**Essay Test:**

1. Bagaimanakah arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin?
2. Dalam rangka mewujudkan sosialisme (dan kelak komunisme) di Indonesia, PKI menempuh beberapa tindakan. Jelaskan tindakan yang dilakukan PKI tersebut!
3. Jelaskanlah hubungan politik konfrontasi yang dilakukan pemerintah terhadap negara Barat dan Malaysia dengan kemerosotan perekonomian Indonesia!
4. Jelaskanlah mengenai Aksi Mahasiswa 66!
5. Upaya pembebasan Irian Barat terus dilakukan pemerintah demi terwujudnya integrasi bangsa. Jelaskanlah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut!

**KUNCI JAWABAN**

No	Jawaban	No	Jawaban
1	C	6	C
2	C	7	D
3	D	8	B
4	A	9	B
5	A	10	B

**Pedoman Penskoran Essay**

No	Jawaban	Skor
1	>Cenderung ke Blok Timur	1
	>Dibentuknya poros Jakarta-Hanoi-Pnom Phen-Pyongyang-Beijing	1
	>adanya NEFO OLDEFO, GANEFO, CONEFO	1
2	>Melakukan infiltrasi ke tubuh T NI	1
	>Mendukung Nasakom	1
	>Menjalin kerjasama dengan komunis RRC	1
3	>Karena konforntasi dengan OLDEFO dan Malaysia	1

	<p>maka Soekarno memutuskan hubungan dengan Barat dan Malaysia</p> <p>&gt;Dilakukan CONEFO dan Ganefo</p> <p>&gt;Proyek Mercusuar</p> <p>&gt;Semua kegiatan ini banyak menghabiskan anggaran sehingga diakhir Demokrasi Terpimpin terjadi hiperinflasi mencapai 650%</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
4	<p>&gt;Muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno</p> <p>&gt;menuntut Tritura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turunkan harga barang</li> <li>- Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya</li> <li>- Rombak kabinet Dwikora</li> </ul> <p>&gt;Menewaskan mahasiswa Arif Rahman Hakim</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
5	<p>&gt;Melalui diplomasi dalam setiap kabinet</p> <p>&gt;Melalui Trikora</p>	<p>1</p> <p>2</p>
	<b>Total Skor</b>	<b>19</b>

SKOR PENILAIAN

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah nilai maksimal (19)}} \times 100$$

c. Rubrik Penilaian Keterampilan (laporan)

No	Nama	Aspek yang Dinilai ( <i>Historical Thinking Skills</i> )																Total skor
		Kronologis				Komprehensif				Analisis				Interpretasi				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		

SKOR PENILAIAN

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah nilai maksimal (16)}} \times 100$$

Pedoman penskoran rubrik

Indikator	1	2	3	4
<b>Kronologis</b>	Peristiwa disampaikan dengan tidak kronologis	Hanya beberapa bagian peristiwa yang tepat secara kronologis	Hampir seluruh bagian peristiwa disampaikan secara kronologis	Peristiwa disampaikan dengan kronologis
<b>Komprehensif</b>	Peristiwa tidak tidak	Peristiwa tidak terlalu	Peristiwa cukup luas dan lengkap	Peristiwa luas dan lengkap

	luas dan lengkap	luas dan kurang lengkap		
<b>Analisis</b>	Tidak menganalisis peristiwa	Analisis kurang mendalam dan kurang mengena terhadap permasalahan dalam peristiwa yang dikaji	Cukup baik dalam menganalisis peristiwa sejarah yang dikaji	Menganalisis dengan baik dan mendalam peristiwa sejarah yang dikaji
<b>Interpretasi</b>	Tidak memberikan interpretasi sendiri terhadap peristiwa	Interpretasi kurang sesuai dengan fakta sejarah	Baik dalam menginterpretasikan fakta sehingga mampu merekonstruksi peristiwa dengan baik	Sangat baik dalam menginterpretasikan fakta sehingga mampu merekonstruksi peristiwa dengan baik

#### d. Materi Ajar

### INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

#### A. Dekrit Presiden

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

##### Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :

- Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
- Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.

- Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan **Dekret Presiden 5 Juli 1959**. Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.

#### **Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.**

- a. Pembubaran konstituante
- b. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS

#### **Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:**

Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal.

Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.

KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.

DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan UUD 1945.

**Dampak positif** diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut:

Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.

Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.

Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertunda pembentukannya.

**Dampak negatif** diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut:

Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.

Memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.

Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

#### **B. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin**

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. **Disebut Demokrasi terpimpin** karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.

Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

### **Tugas Demokrasi terpimpin :**

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :

Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.

**Dampaknya:** Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

### **Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :**

- Kebebasan partai dibatasi
- Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
- Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

## **C. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945**

### **1. Kedudukan Presiden**

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya **bertentangan dengan UUD 1945**, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

### **2. Pembentukan MPRS**

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut **bertentangan dengan UUD 1945** karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :

***Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.***

Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

### **3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan

presiden tersebut *bertentangan dengan UUD 1945* sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.

**Tugas DPR GR** adalah sebagai berikut.

- Melaksanakan manifesto politik
- Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
- Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

#### **4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara**

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. **Tugas DPAS** adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul *"Penemuan Kembali Revolusi Kita"* yang dikenal dengan *Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)* ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah **USDEK** (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan **MANIPOL USDEK**.

#### **5. Pembentukan Front Nasional**

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. **Tujuannya** adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. **Tugas** front nasional adalah sebagai berikut.

- Menyelesaikan Revolusi Nasional
- Melaksanakan Pembangunan
- Mengembalikan Irian Barat

#### **6. Pembentukan Kabinet Kerja**

Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk **kabinet Kerja**. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). **Program kabinet** ini adalah sebagai berikut.

- Mencukupi kebutuhan sandang pangan
- Menciptakan keamanan negara
- Mengembalikan Irian Barat.

#### **7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom**

Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan

menyampaikan ajaran **NASAKOM** (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarakan pada masyarakat. ***Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden.***

Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

### **8. Adanya ajaran RESOPIM**

Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.

Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

### **9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia**

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

### **10. Penataan Kehidupan Partai Politik**

Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.

Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian.

Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebut adalah karena sejumlah anggota dari kedua

partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

## **11. Arah Politik Luar Negeri**

### **a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo**

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang **Nefo** (*New Emerging Forces*) dan **Oldefo** (*Old Established Forces*). **Nefo** merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. **Oldefo** merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

### **b. Politik Konfrontasi Malaysia**

Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.

Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.

Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.

Pelaksanaan Dwikora dengan mengirim sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.

### **c. Politik Mercusuar**

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

### **d. Politik Gerakan Non-Blok**

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur. Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan

politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.

Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin tampak dengan:

- a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
- b. Pidato presiden yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.
- c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
- d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.
- e. Pidato presiden yang berjudul "Berdiri di atas Kaki Sendiri" sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.
- f. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol.
- g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

#### **D. Perjuangan Membebaskan Irian Barat**

Ada 3 bentuk perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat : Diplomasi, Konfrontasi Politik dan Ekonomi serta Konfrontasi Militer.

##### **1. Perjuangan Diplomasi**

Ditempuh guna menunjukkan niat baik Indonesia mandahulukan cara damai dalam menyelesaikan persengketaan. Perjuangan tersebut dilakukan dengan perundingan. Jalan diplomasi ini sudah dimulai sejak **kabinet Natsir (1950)** yang selanjutnya dijadikan program oleh setiap kabinet. Meskipun selalu mengalami kegagalan sebab Belanda masih menguasai Irian Barat bahkan secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda.

Perjuangan secara diplomasi ditempuh dengan 2 tahap, yaitu

##### **e. Secara bilateral, melalui perundingan dengan belanda.**

Berdasarkan perjanjian KMB masalah Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan, setahun setelah pengakuan kedaulatan. Pihak Indonesia menganggap bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat pada waktu yang telah ditentukan. Sementara Belanda mengartikan perjanjian KMB tersebut bahwa Irian Barat hanya akan dibicarakan sebatas perundingan saja, bukan diserahkan. Berdasarkan alasan tersebut maka Belanda mempunyai alasan untuk tetap menguasai Indonesia. Akhirnya perundingan dengan Belanda inipun mengalami kegagalan.

**f. Diplomasi dalam forum PBB**, yaitu dengan membawa masalah Indonesia-Belanda ke sidang PBB. Dilakukan sejak Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, hingga Ali Sastroamijoyo II.

Dikarenakan penyelesaian secara diplomatik mengalami kegagalan dan karena adanya pembatalan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak maka Indonesia sejak 1954 melibatkan PBB dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

Dalam sidang PBB Indonesia berupaya meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapatkan perhatian Internasional. Alasan Indonesia adalah karena masalah Irian Barat menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain.

Upaya melalui forum PBB pun tidak berhasil karena mereka menganggap masalah Irian Barat merupakan masalah intern antara Indonesia-Belanda. Negara-negara barat masih tetap mendukung posisi Belanda. Indonesia justru mendapat dukungan dari negara-negara peserta KAA di Bandung yang mengakui bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia.

## **2. Perjuangan Konfrontasi Politik, Ekonomi dan Militer**

Karena perjuangan diplomasi baik bilateral maupun dalam forum PBB belum menunjukkan hasil sehingga Indonesia meningkatkan perjuangannya dalam bentuk konfrontasi. Konfrontasi dilakukan tetapi tetap saja melanjutkan diplomasi dalam sidang-sidang PBB. Konfrontasi yang ditempuh yaitu konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer.

Konfrontasi militer terpaksa dilakukan setelah Belanda tidak mau berkompromi dengan Indonesia.

### **a. Konfrontasi Politik dan Ekonomi**

**Konfrontasi ekonomi** dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-aset dan kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi ekonomi tersebut sebagai berikut.

- 1) Tahun **1956** secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan pembatalan utang-utang RI kepada Belanda.
- 2) Selama tahun **1957** dilakukan :
  - Pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda
  - Melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda
  - Melarang penerbangan kapal-kapal Belanda
  - Memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia
- 3) Selama tahun **1958-1959** dilakukan :
  - Nasionalisasi terhadap ± 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
  - Mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dan Rotterdam (Belanda) ke Bremen, Jerman.

**Konfrontasi Politik** dilakukan melalui tindakan sebagai berikut.

- 1) Tahun **1951**, Kabinet Sukiman menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan *Unie-Statuut*.
- 2) Tanggal **3 Mei 1956**, pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, diumumkan pembatalan semua hasil KMB.
- 3) Pada tanggal **17 Agustus 1956** dibentuk provinsi Irian Barat dengan ibukotanya kotanya di Soa Siu (Tidore) dan Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore) sebagai gubernurnya yang dilantik tanggal 23 September 1956. Provinsi Irian Barat meliputi : Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile.
- 4) **18 November 1957** terjadi Rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta.
- 5) **Tahun 1958**, Pemerintah RI menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Pemecatan semua pekerja warga Belanda di Indonesia
- 6) Tanggal **8 Februari 1958**, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
- 7) Tanggal **17 Agustus 1960** diumumkan keputusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

## **b. Konfrontasi Militer**

Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut maka tahun 1961 dalam Sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan mengenai masalah Irian Barat.

Diputuskan bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda.

Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan **Rencana Bunker**, yaitu :

- 1) Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
- 2) Setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri.
- 3) Pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu dua tahun.
- 4) Guna menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan pemerintah peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

Indonesia menyetujui usul itu dengan catatan jangka waktu diperpendek. Pihak Belanda tidak mengindahkan usul tersebut bahkan mengajukan usul untuk menyerahkan Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Selanjutnya PBB membentuk negara Papua dalam jangka waktu 16 tahun.

Jadi Belanda tetap tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Keinginan Belanda tersebut tampak jelas ketika tanpa persetujuan PBB, Belanda mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Tindakan Belanda tersebut tidak melemahkan semangat bangsa Indonesia. Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya menempuh jalan kekuatan fisik (militer).

### **Perjuangan melalui jalur militer ditempuh dengan tujuan untuk:**

- Menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memperjuangkan apa pun yang memang menjadi haknya.
- Menunjukkan kesungguhan dan memperkuat posisi Indonesia.
- Menunjukkan sikap tidak kenal menyerah dalam merebut Irian Barat.

### **Persiapan pemerintah untuk menggalang kekuatan militer adalah :**

Pada Desember 1960, mengirimkan misi ke Uni Soviet untuk membeli senjata dan perlengkapan perang lainnya. KSAD mengunjungi beberapa negara, seperti India, Pakistan, Thailand, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Perancis, dan Inggris untuk menjajaki sikap negara-negara tersebut bila terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Tindakan persiapan Indonesia tersebut dianggap oleh Belanda sebagai upaya untuk melakukan Agresi. Sehingga Belanda kemudian memperkuat armada dan angkatan perangnya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Dorman. Maka Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikorra) di Yogyakarta yang telah dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional. Peristiwa ini menandai dimulainya secara resmi konfrontasi militer terhadap Belanda dalam rangka mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.

### **Isi Trikorra adalah sebagai berikut.**

- 1) Gagalakan Pembentukan Negara boneka papua buatan Belanda
- 2) Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat, Tanah air Indonesia
- 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Selanjutnya, diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan Gabungan Kepala Staf serta Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. **Keputusan dari rapat** tersebut adalah:

- Dibentuk Provinsi Irian Barat gaya baru yang beribu kota di Jayapura (zaman Belanda bernama Hollandia) dengan putra Irian sebagai gubernurnya.
- Tanggal 11 Januari 1962 dibentuk Komando Tertinggi dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar yang langsung di bawah ABRI dengan tugas merebut Irian Barat.

**Tugas Komando Mandala** adalah sebagai berikut.

- Menyelenggarakan operasi Militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi militer tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu penyusupan (infiltrasi), serangan besar-besaran (eksploitasi), dan penegakan kekuasaan Republik Indonesia (Konsolidasi).
- Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu terdiri atas tentara reguler dan sukarelawan maupun berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya

Tanggal 13 Januari 1962, **Brigadir Jendral Suharto** dilantik sebagai Panglima Mandala dengan pangkat Mayor Jendral, beliau juga merangkap sebagai Deputy KSAD untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Sebelum konsolidasi yang dilakukan oleh Komando Mandala selesai, Tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam pertempuran tersebut Deputy KSAL Komodor Yos Sudarso gugur.

### **c. Konfrontasi Total**

Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 kepada **Panglima Mandala** yang isinya sebagai berikut. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.

Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia.

Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut:

#### **a. Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),**

yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.

#### **b. Tahap Eksploitasi (awal 1963),**

yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.

#### **c. Tahap Konsolidasi (awal 1964),**

yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltrasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak.

#### **d. Akhir Konfrontasi**

Surat perintah tersebut dikeluarkan setelah ditandatangani persetujuan antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang selanjutnya dikenal dengan **Perjanjian New York**. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Subandrio sementara itu Belanda dipimpin oleh Van Royen dan Schuurman. Kesepakatan tersebut berisi.

- 1) Kekuasaan pemerintah di Irian Barat untuk sementara waktu diserahkan pada **UNTEA** (*United Nations Temporary Executive Authority*)
- 2) Akan diadakan **PEPERA** (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat sebelum tahun 1969.

Untuk menjamin Keamanan di Irian Barat dibentuklah pasukan penjaga perdamaian PBB yang disebut **UNSF** (*United Nations Security Force*) yang dipimpin oleh Brigadir Jendral Said Udin Khan dari Pakistan.

Berdasarkan **Perjanjian New York** proses untuk pengembalian Irian Barat ditempuh melalui beberapa **tahap**, yaitu :

- 1) Antara 1 Oktober -31 Desember 1962 merupakan masa pemerintahan UNTEA bersama Kerajaan Belanda.
- 2) Antara 1 Januari 1963- 1 Mei 1963 merupakan masa pemerintahan UNTEA bersama RI.
- 3) Sejak 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI.
- 4) Tahun 1969 akan diadakan *act of free choice*, yaitu penentuan pendapat rakyat (Perpera).

Penentuan Pendapat rakyat (Perpera) berarti rakyat diberi kesempatan untuk memilih tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau Merdeka.

Perpera mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke sampai dengan 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasil Perpera tersebut adalah **mayoritas rakyat Irian Barat menyatakan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Hasil Pepera selanjutnya dibawa oleh Diplomat PBB, **Ortis Sanz** (yang menyaksikan setiap tahap Pepera) untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24.

Tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan hasil Pepera tersebut.

Sitoluama, September 2020

Guru Mata Pelajaran

Erika Siboro, S.Pd